



# Buletin Parlementaria

## Parlemen Terus Dorong Pemberian KUR bagi UMKM



3 Konflik Israel-Palestina, DPR Tekankan Pentingnya Perdamaian



7 Revisi UU ASN Bentuk Perhatian pada Pengabdian Tenaga Honorar

Nomor 1268/III/X/2023 • Oktober 2023



9 772614 339005



# Parlemen Terus Dorong Pemberian KUR bagi UMKM

**K**omisi XI DPR RI mendorong Bank Indonesia (Bank Indonesia), OJK, LPS, Himbara, Jamkrindo dan Askrindo bersinergi dengan seluruh Pemerintah Provinsi. Khususnya di Sulawesi Selatan (Sulsel), supaya dapat memberi perhatian khusus terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan meningkatkan pagu Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Dengan demikian, diharapkan indeks perekonomian Sulsel dapat kembali rebound bertumbuh di atas rata-rata nasional. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Amir Uskara saat diwawancarai **Parlementaria** usai memimpin tim kunjungan kerja reses Komisi XI DPR RI ke Gowa, Provinsi Sulsel, Rabu (4/10).

"Kalau kita melihat pagu kredit untuk UMKM di Sulsel ini memang masih belum maksimal, itu sangat masih kecil terlihat dari KUR mikro yang digelontorkan di perbankan di Sulsel ini masih sangat kecil dibandingkan grade kredit nasional lainnya," ujar Politisi Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) ini menyayangkan.

"Tentu kita terus mendorong industri memberikan perhatian yang lebih khusus kepada UMKM kita yang selama ini memang saya kira cukup kuatlah untuk pertumbuhan ekonomi dan tentu pasti akan cukup berpengaruh maksimal," lanjut Legislator Dapil Sulsel I ini.

Namun demikian, ia optimis menyakini pertumbuhan ekonomi rata-rata nasional di Sulsel bisa *rebound* kembali sebagaimana tahun-tahun sebelumnya di atas



Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Amir Uskara saat kunjungan kerja reses Komisi XI DPR RI ke Gowa, Provinsi Sulsel, Rabu (4/10/2023).

rata-rata nasional. Bahkan, seperti yang saya sampaikan tadi sekitar 200 basis points di atas rata-rata nasional. Mudah-mudahan itu bisa segera kembali," pungkasnya.

Di tempat yang sama, Anggota Komisi XI DPR RI Marinus Gea menyoroti percepatan transaksi digital menggunakan sistem pembayaran *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS), yang hingga saat ini mengalami peningkatan signifikan hampir diseluruh wilayah Indonesia. Hal itu terbukti saat Komisi XI DPR RI menggelar kunjungan lapangan meninjau beberapa tenant UMKM di Provinsi Sulsel.

"Saya kira, program yang sudah sangat baik hari ini adalah QRIS itu. Jadi kalau kita belum merasa kesulitan untuk menggunakan QRIS, saya kira ini menjadi alternatif yang sangat baik dan harus kita kembangkan, kita pertahankan," ujar Marinus.

Marinus menyatakan, hampir seluruh UMKM diseluruh pelosok tanah air kini menggunakan sebagai alat pembayaran. Oleh karena itu, Marinus Gea mengapresiasi kinerja Bank Indonesia (BI) yang gencar melakukan sosialisasi QRIS sehingga UMKM menjadi terdigitalisasi. **pun/aha**

Scan QR untuk berita selengkapnya





# Konflik Israel-Palestina, DPR Tekankan Pentingnya Perdamaian

**K**tua DPR RI Puan Maharani menyampaikan agar Indonesia segera mengambil sikap dan menjadi penengah dalam konflik antara Palestina-Israel sehingga peperangan dapat dihentikan. Pemerintah pun, tambahnya, perlu menyerukan pentingnya perdamaian dengan konsep dua negara berdaulat (*two-state solution*) yang berdampingan. Hal tersebut demi menghindari bertambahnya korban kemanusiaan yang semakin hari semakin bertambah.

"Konsep tersebut sesuai landasan yang telah lama diakui sebagai jalan menuju penyelesaian yang adil. Kita perlu menyampaikan agar kedua negara mengedepankan unsur dialog untuk mendinginkan situasi di sana dan terus bersuara kepada dunia untuk mendukung kemerdekaan Palestina," ucap Puan di Jakarta, Senin (9/10).

DPR juga menilai diperlukan kehadiran negara-negara

lain untuk terus menyuarakan perdamaian di Palestina. Puan mengatakan Indonesia harus menunjukkan sikap politik internasional yang bebas aktif sesuai amanat konstitusi. Sebagai Ketua DPR RI, ia sendiri dalam berbagai kesempatan di forum internasional terus menyuarakan kemerdekaan Palestina. Seperti dalam Sidang *Inter-Parliamentary Union* (IPU) ke-144 yang digelar di Bali tahun 2022 lalu.

"Dalam beberapa forum Parlemen dunia, DPR selalu menyuarakan untuk mendukung kemerdekaan Palestina. Kami terus berkomitmen menyelesaikan berbagai konflik di belahan bumi lainnya," ucapnya. **ts/aha**



**KETUA DPR RI  
DR. (H.C) PUAN MAHARANI.**

Scan QR  
untuk berita  
selengkapnya



FOTO: FOTO: JKA/PDT



**PENGAWAS UMUM**  
Pimpinan DPR RI

**KETUA PENGARAH**

Ir. Indra Iskandar, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI)

**PIMPINAN PELAKSANA**

Dr. Indra Pahlevi, S.I.P., M.Si, (Karo Pemberitaan Parlemen)

**PIMPINAN REDAKSI**

Irfan S. Sos, MMSI (Kabag Media Cetak)

**W.K PIMPINAN REDAKSI**

Rizka Arinindy, S.Sos. (Kasubag Media Cetak dan Website)

Agus Budi Leksono, S.A.P (Kasubag Analisis Media)

Nita Juwita, S.Sos. (Kasubag Media Sosial)

**REDAKTUR**

Agung Hidayat, S.I.P, Ridwan Budiman, S.I.P, Muhammad Husen

**REDAKTUR FOTO**

M. Andri Nurdiansyah

**SEKRETARIS REDAKSI**

Fadlun Bariyah, Prima Danutirta, A.Md,

Andi Nurul Nauval Ramadhina, A.Md.Ds

**ANGGOTA REDAKSI**

Tiara Saum, S.I.Kom, Hira Askamal, S.I.Kom, Bianca Destianti, S.I.Kom, Yhusanti Pratiwi Sayogo, S.I.Kom, Wilga Emilson, S.Sos., Ananda Galuh Pawestri, S.I.Kom, Naden Ivan, S.I.Kom., Ubaid Faurizal, S.I.Kom, Shane Savera Sa'diyah, S.I.Kom., Rahayu Setyowati, Virgianne Meiske Patuli, Ria Nur Mega, Surahmat Eko Budi Setianto, Taufan Syahrulli, Puntho Pranowo, Singgih Kinanti Rimbani, Siti Nadiyah, Nafisa Hanum Alaydrus, Bunga Leonnaricha Firda Dysie, BALEGYS Maeshyntha, Anju Alfonso Sitompul, Zulfikar Mubien

**FOTOGRAFER**

Naefuroji, Jaka Nugraha, Devi Irandi, Runi Sari Budlarti, Arief Rachman, R. Kresno PD. Moempoeni, Azka Restu Afdhillah, Geraldidi Opie, Hasri Mentari, Friederick Munchen

**ANALIS MEDIA**

Supian, S.E, Larissa Amanda Indianti Siahaan, S.I.P, Eki Baehaki, S.Sos, M. Rizki Ramadhan, S.I.Kom, M. Rizki Nugraha, Sunarya, Fahmi Harfa, Safitri Restu Widjowati, Rosnita, Yoga Achmad Fauzan, Intan Putri Suciani, Riska Ramadhani

**INFOGRAFIS**

Tiara Annisa, Chasbi Chusna Mulia, Dipa Natalio, Aisyah Salmah, Dewa Pratama, Estu Mega Nurjanah Putri

**ADMINISTRASI**

Suhendi, Lutfi Suci Nur'aini, Damar Maulana Taher, Fitrianto

**PENERBITAN**

**PIMPINAN PENERBITAN**

Djoko Hanggoro, ST (Kabag Penerbitan)

**PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI**

Mediantoro, S.E (Kasubag Produksi)

**DESAIN GRAFIS**

Dito Sugito, Ihsan Syahrezi, Aan Risdiana, M.Kom

**IT MEDIA DIGITAL**

Muhamad Hendar Assifa, S.Kom, Savant Rifqi Hidayat, S.E

**PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI**

Eny Sulistiawati, S.Kom (Kasubag Distribusi)

**KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI**

Ria Damayanti

**ADMINISTRASI**

**STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI**

Handhal Dwi Akbar, Nabila Khairunnisa, Made Chrisna Dwipa

Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421

Email : bag\_penerbitan@dpr.go.id

**ISI BERITA DAN MATERI FOTO**

**DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN**

**HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN HASIL Cetak dan Distribusi (GRATIS)**

# Terima Delegasi Jepang, Gobel Ajak Investasi Berkonsep Wawasan Lingkungan



FOTO: AZK/PDT

Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel saat menerima kunjungan delegasi dari Jepang yang dipimpin oleh (H.E) Mr. Izumi Hiroto di Nusantara III, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (9/10/2023).

**W**akil Ketua DPR RI Rachmat Gobel menerima kunjungan

delegasi dari Jepang yang dipimpin oleh (H.E) Mr. Izumi Hiroto. Dalam kunjungan ini, kedua belah pihak mendiskusikan tentang rencana Jepang yang akan ikut andil dalam berinvestasi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Merespon hal tersebut, Gobel mendorong agar Jepang bisa berinvestasi di IKN dengan konsep kota berwawasan lingkungan.

"Jepang memberikan respon sangat positif mereka berkeinginan sekali untuk ikut menjadi bagian dalam membangun ibu kota baru itu sendiri dan saya mendorong Jepang, karena Jepang mempunyai konsep-konsep pembangunan kota berwawasan lingkungan," papar Gobel sesuai pertemuan di Nusantara III, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (9/10).

Konsep kota berwawasan lingkungan mencakup perencanaan dan pengelolaan perkotaan yang berfokus pada keberlanjutan dan penghormatan terhadap lingkungan.

Seperti pemanfaatan ruang hijau, transportasi berkelanjutan, efisiensi energi dan air, yang menerapkan sistem pengelolaan limbah yang efektif, serta melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan.

"Apalagi Jepang juga punya peran yang besar di dalam pengurangan zero emisi. Makanya pembangunan ini bagaimana juga untuk mengarah kepada yang betul-betul menjadi bagian untuk mengurangi emisi bukan menambah tapi mengurangi," jelas Gobel.

Menurut Politisi dari Fraksi Partai NasDem ini, Jepang selalu melakukan penelitian yang matang dalam setiap pembangunan. Jepang juga dikenal dengan kualitasnya yang selalu dijaga, dan penerapan teknologi yang unggul.

"Makanya saya ingin mendorong, ini momentum buat Jepang juga gitu, dan saya berharap konsep-konsep pembangunan kawasan itu yang berwawasan lingkungan bisa nanti dicontoh menjadi contoh untuk daerah-daerah lain yang ingin membangun pembangunan daerahnya," ujar Gobel.

Adapun beberapa delegasi Jepang yang hadir, di antaranya Izumi Hiroto (*Former Advisor to Prime Minister of Japan*), Takahashi Seichii (*Honorary Chairman of Sanko Sofian Holdings*), Miyoshi Osamu (*Chairman of Miyoshi Real Estate*), Mizuno Takashi (*Vice Chairman of Planning Supply*), dan lainnya.

arn, far, ssb / rdn



# Ongku Hasibuan **Sesalkan** Keluarnya Peraturan Pemerintah di '*Injury Time*' Tahapan Persiapan Pemilu

**A**nggota Komisi II DPR RI Ongku P. Hasibuan menilai, secara keseluruhan tahapan persiapan Pemilu yang dilaksanakan KPU Bawaslu Provinsi Sumatera Utara sudah cukup baik, hanya saja dengan munculnya aturan-aturan baru yang dikeluarkan di *injury time* yang mengakibatkan semuanya perlu penyesuaian kembali.

"Saya cuma menyalahkan bahwa itu datangnya pada saat-saat *injury time*, itu saja, *timing* saja, kalau boleh itu (aturan 30% keterwakilan perempuan dan caleg mantan narapidana) ditunda ke 2029 saja, kalau misalnya ketentuan itu diberlakukan, oke diberlakukan tapi mulai berlaku tahun 2029, karena sekarang sudah masuk tahapan penyelesaian persiapan ini," katanya di Medan, Sumatera Utara, Kamis (5/10).

Selain putusan MA soal keterwakilan perempuan 30 persen di Parlemen, juga soal Caleg Mantan Narapidana, Ongku mengatakan masih ada perkembangan lainnya yang seolah terus-menerus dan tanpa ada hentinya, seperti misalnya saat ini menunggu adanya putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pemilihan Presiden yang menyangkut batas usia 35 tahun dan sebagainya.

"Kita kadang-kadang terkejut-kejut juga dengan adanya keputusan-keputusan MK ini, inikan disaat-saat *injury time* seperti ini tinggal tanggal berapa sudah kita harus masukkan DCT keluar dan sebagainya, ini masih

ada peraturan-peraturan yang masih harus diubah dan sebagainya atas perintah daripada mahkamah agung ataupun mahkamah konstitusi, terutama yang paling akhir kan tentang keterwakilan perempuan," ungkapnya.

Ongku mengatakan, dengan banyaknya peraturan dan putusan Pemerintah yang dikeluarkan ini perlu diantisipasi, dan saat ini menurutnya, KPU Provinsi Sumut masih menunggu surat edaran dari pusat untuk secepatnya beradaptasi dengan aturan yang ada, jika tidak dilakukan penyesuaian maka hal ini dapat menimbulkan sengketa nantinya, mengingat potensi sengketa itu sangatlah besar.

Begitupun dengan wacana Pemerintah memajukan pelaksanaan Pilkada Serentak di September, secara kesiapan pihak KPU dan Bawaslu menyatakan kesiapannya, namun Ongku belum melihat langkah konkret dari kesiapan itu.

"Kalau dari pusat mereka sendiri mereka bilang siap, tapi kita sendiri belum lihat langkah-langkah konkretnya, mereka bilang mereka siap, karena ada lagi masalah baru bahwa pilkada mau dimajukan ke September, usulan dari Mendagri sudah ada, kita sudah RDP sudah ngomong dengan Mendagri tetapi istilahnya adalah bahwa bener gak kita siap, saya khawatir kalau terjadi putaran kedua pilpres," katanya.

— ndy/aha



Anggota Komisi II DPR RI Ongku P. Hasibuan saat mengikuti pertemuan Tim Kunker Reses Komisi II DPR RI di Medan, Sumatera Utara, Kamis (5/10/2023).

Scan QR untuk berita selengkapannya



FOTO: NDY/PDT

# Marak Kasus Pertanahan, Bagus Adhi Dorong BPN Jadi Garda Terdepan Bagi Rakyat Indonesia

**A**nggota Komisi II DPR RI Bagus Adhi Mahendra Putra menanggapi terkait maraknya kasus pertanahan yang ada di Indonesia khususnya terkait permasalahan yang terjadi di Pulau Rempang. Ia meminta Badan Pertanahan Nasional (BPN) bisa menjadi garda terdepan bagi rakyat Indonesia. Hal ini berlandaskan semangat mencapai tujuan cita-cita bangsa, sesuai amanat dari konstitusi UUD 1945.

"Harus melihat secara detail keberadaan masyarakatnya, daerahnya, apakah mungkin diberikan izin dalam pengelolaan kawasan. Andai kata lahan itu kosong atau ada bangunan yang tidak permanen baru itu kemungkinan bisa dijadikan sertifikat HPL. Ini pelajaran bagi kita semua dalam melahirkan sertifikat HPL harus melihat kemungkinan besarnya jangan sampai nantinya menjadi senjata dalam mengusir keberadaan masyarakat yang ada di atas lahan tersebut," jelas Bagus Adhi dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI ke Batam, provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Jumat (29/9).

”

**KARENA KELANGSUNGAN HIDUP MASYARAKAT INI MENJADI TITIK YANG TERPENTING DI DALAM KITA MELAKSANAKAN RELOKASI TERSEBUT.**

Politisi Fraksi Partai Golkar itu menilai pentingnya pemetaan secara menyeluruh sehingga nantinya tersusun peta yang kuat, akurat dan detail sehingga jalan keluar terkait permasalahan di Pulau Rempang dapat segera terselesaikan.

"Sehingga tidak ada lagi hoaks, tidak lagi dengar isu dipindahkan ke tempat A, dan sebagainya. Maka itu transparansi sosialisasi menjadi penting antara investor dan masyarakat harus duduk bersama demi pembangunan terlaksana, masyarakat sejahtera," ungkap Bagus Adhi.

Lebih lanjut menanggapi terkait relokasi masyarakat di Pulau Rempang, Bagus Adhi menuturkan bukan hanya kerugian dan untung saja yang harus dipikirkan namun juga bagaimana kelangsungan hidup masyarakat setempat.

"Karena kelangsungan hidup masyarakat ini menjadi titik yang terpenting di dalam kita melaksanakan relokasi tersebut. Karena semangat kita melaksanakan pembangunan adalah sejauh mana meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kalau masyarakatnya tidak sejahtera ya sia-sia," tandasnya.

— tra/aha



FOTO: TRA/PDI

Anggota Komisi II DPR RI Bagus Adhi Mahendra Putra saat mengikuti pertemuan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI ke Batam, provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Jumat (29/9/2023).

Scan QR untuk berita selengkapnya



# Revisi UU ASN Bentuk Perhatian pada Pengabdian Tenaga Honorer

**A**nggota Komisi II DPR RI Hugua menilai revisi Undang-Undang (UU) tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berhasil diparipurnakan tempo hari merupakan terobosan penting dalam mengatur dunia birokrasi. Salah satunya kepastian posisi tenaga honorer, dimana tidak akan ada PHK massal untuk para pegawai tersebut.

Selain itu, para tenaga honorer direncanakan untuk dapat melamar jalur khusus pada seleksi PPPK di rekrutmen ASN tahun ini. "Saya rasa ini jadi privilese, terutama bagi yang lama mengabdikan. Jadi semakin lama pengabdian semakin dihitung dengan kebijakan-kebijakan. Saya

”

**JADI INI TIDAK BISA KITA TUTUP MATA BAHWA, PERAN TENAGA HONORER DI DALAM MENGEMBANGKAN DAN MELANCARKAN MESIN BIROKRASI DEMI TEGAKNYA BANGSA DAN NEGARA.**

kira itu yang paling mendasar di dalam (revisi) UU ini," terang Hugua ditemui usai Kunjungan Kerja Komisi II di Provinsi Jawa Timur, Rabu (4/10).

Penyesuaian ini muncul setelah sebelumnya penerimaan PPPK bagi honorer digabung dengan pelamar umum. Hugua melihat, sistem perankingan dengan pelamar umum menyulitkan para tenaga honorer yang sudah berumur. Padahal tak sedikit dari mereka yang menghabiskan karirnya mengabdikan sebagai honorer di sudut daerah terpencil administrasi dan birokrasi negara Indonesia.

"Karena kita harus memahami dan menghargai bahwa negara ini maju seperti sekarang tidak terlepas dari peran birokrasi otomatis, tapi sekali lagi jangan lupa bahwa peran tenaga honorer di dalam menjalankan mesin birokrasi itu tinggi, tinggi sekali," ujar Hugua.

Ia mencontohkan, tak jarang sebuah sekolah di daerah terpencil di Indonesia yang hanya kepala sekolahnya saja yang PNS, selebihnya guru honorer. Banyak pula puskesmas yang bernasib sama serta balai desa yang cuma sekretaris desanya saja pegawai negeri, sedangkan selebihnya adalah tenaga honorer.

"Jadi ini tidak bisa kita tutup mata bahwa, peran tenaga honorer di dalam mengembangkan dan melancarkan mesin birokrasi demi tegaknya bangsa dan negara seperti posisi Indonesia yang keren seperti ini di baik sebagai pusat pertumbuhan ekonomi global di ASEAN tentu dan Indonesia menjadi bagian penting dari episentrum itu. Peran tenaga honorer ini begitu tinggi," tegasnya.

[aha,laz,ail/aha](#)



FOTO: AHA/PDI

Scan QR untuk berita selengkapnya



Anggota Komisi II DPR RI Hugua saat diwawancarai usai pertemuan Kunjungan Kerja Komisi II di Provinsi Jawa Timur, Rabu (4/10/2023).

# Legislator Nilai Polisi Gegabah Tangani Demo di Seruyan Hingga Tewaskan Warga

**A**nggota Komisi III DPR RI Gilang Dhillafarafez menayangkan penanganan demo di kebun sawit, Seruyan, Kalimantan Tengah (Kalteng) yang menewaskan warga. Polisi pun dinilai gegabah saat menangani demo warga yang berujung ricuh tersebut.

"Harusnya mengedepankan unsur preventif dalam menangani aksi demo apalagi yang dilakukan

”

**HARUSNYA MENGEDEPANKAN UNSUR PREVENTIF DALAM MENANGANI AKSI DEMO APALAGI YANG DILAKUKAN WARGA SAAT MEREKA MENUNTUT HAKNYA. SEBAGAI ABDI NEGARA, POLISI SEHARUSNYA MENGAYOMI MASYARAKAT.**

warga saat mereka menuntut haknya. Sebagai abdi negara, polisi seharusnya mengayomi masyarakat," ujar Gilang dalam rilis yang diterima **Parlementaria** di Jakarta, Senin (9/10).

**Anggota Komisi III DPR RI  
Gilang Dhillafarafez.**

Bentrokan antara pihak kepolisian dengan warga di kebun sawit, Seruyan, Kalimantan Tengah (Kalteng) terjadi saat aksi demo pada Sabtu (7/10) kemarin. Warga menuntut PT Hamparan Masawit Bangun Persada (HMBP) memenuhi janji untuk memberikan 20 persen kebun plasma dan kawasan hutan di luar Hak Guna Usaha (HGU). Demo dilakukan karena pihak perusahaan tak juga memenuhi kesepakatan setelah puluhan tahun berjanji.

Dalam aksi demo itu, diketahui tiga orang warga mengalami luka-luka akibat tindakan represif aparat kepolisian. Bahkan salah seorang warga tewas dengan luka tembak yang diduga dilakukan oleh oknum kepolisian. Gilang pun mengecam aksi kekerasan yang terjadi, di mana video bentrokan sempat viral di media sosial.

Dalam video yang beredar terlihat adanya sejumlah warga mengangkat rekannya yang terkapar bersimbah darah. Warga yang berdemo di kebun kelapa sawit berteriak-teriak meminta tolong agar temannya yang terluka dapat dievakuasi. Di video yang lain terdengar juga berkali-kali suara letusan tembakan.

Bahkan dari pengeras suara terdengar adanya perintah penembakan dari oknum polisi untuk membubarkan warga yang berdemo. Gilang mengatakan, penanganan aksi demo dari pihak aparat sudah keterlalu. "Dari video saja sudah terlihat sadis, cara aparat memperlakukan warga yang demo tidak manusiawi," ujarnya.

**ssb/aha**



FOTO:RSB/PDT

Scan QR  
untuk berita  
selengkapnya



# Didik Mukrianto Minta Polri Memberantas Kejahatan Jalanan

**A**nggota Komisi III DPR RI Didik Mukrianto menanggapi peristiwa main hakim sendiri yang terjadi di

Warakas, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dia meminta Kepolisian untuk tidak menganggap peristiwa tersebut hanya sebagai kenakalan remaja biasa. Apapun bentuk persekusi disebutkan sudah masuk ranah pidana.

"Kepolisian harus memastikan penegakan hukum yang tegas terhadap anggota geng remaja yang terlibat dalam aktivitas pelanggaran pidana atau melawan hukum," ujar Didik dalam rilis yang diterima **Parlementaria**, di Jakarta, Selasa (3/10).

Legislator dari Dapil Jawa Timur IX ini menjelaskan, persoalan geng motor masih menjadi momok bagi aparat penegak hukum. Oleh karena itu, Didik meminta Polri membuat satuan khusus untuk memberantas kejahatan jalanan seperti geng motor.

"Kapolri harus memberikan atensi kepada kasus geng motor ini karena sudah meresahkan. Ciptakan satuan

unit khusus yang ada di setiap Polres untuk melakukan patrol rutin setiap harinya, sebagai upaya antisipasi kejahatan jalanan," tutur Politisi Fraksi Partai Demokrat ini.

Berdasarkan data Polri, jumlah kasus kejahatan yang dilakukan oleh geng motor di Indonesia meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2022, tercatat sebanyak 1.844 kasus kejahatan yang dilakukan oleh geng motor. Jumlah tersebut meningkat dari 1.250 kasus pada tahun 2021.

Dari jumlah itu, jenis kejahatan yang paling banyak dilakukan oleh geng motor adalah pencurian dengan kekerasan, dengan jumlah kasus sebanyak 688 pada tahun 2022. Jenis kejahatan lain yang juga sering dilakukan oleh geng motor adalah penganiayaan, perampokan, dan tawuran antar geng motor.

Didik memberikan usulan agar Polri mengaktifkan kembali Tim Reaksi Cepat dari unit Sabhara di setiap Polres. Dengan dihidupkannya kembali unit satuan tersebut, diharapkan akan membuat masyarakat tenang saat beraktivitas di malam hari.

"Dulu itu di Jakarta ada tim reaksi cepat yang patrol setiap malamnya, bahkan di setiap Polres pun ada untuk mengantisipasi kejahatan jalanan di daerahnya. Ini yang harus dihidupkan kembali. Tak hanya di Jakarta, tapi di daerah-daerah lainnya juga," imbau Didik.

— **ssb/rdn**

**Anggota Komisi III DPR RI Didik Mukrianto.**



”

**DULU ITU DI JAKARTA ADA TIM REAKSI CEPAT YANG PATROL SETIAP MALAMNYA, BAHKAN DI SETIAP POLRES PUN ADA UNTUK MENGANTISIPASI KEJAHATAN JALANAN DI DAERAHNYA.**

Scan QR untuk berita selengkapnya



FOTO: IKA/PDT

# Pastikan Ketahanan Pangan, Komisi IV Tinjau Langsung Lumbung Pangan Papua di Merauke



Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Budhy Setiawan (kiri) saat memimpin Tim Kunker Reses Komisi IV DPR RI ke Merauke, Provinsi Papua Selatan, Rabu (4/10/2023).

**K**omisi IV DPR RI secara langsung memantau stok dan harga beras saat kunjungan kerja reses ke Merauke.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Budhy Setiawan mengungkapkan kunjungan tersebut juga bertujuan melihat secara langsung potensi pertanian di Merauke sebagai lumbung pangan di wilayah Papua.

Sekaligus, meninjau sektor perikanan dan kelautan khususnya program yang telah diberikan Pemerintah. Hal itu disampaikan Budhy saat memimpin tim kunjungan kerja reses Komisi IV DPR RI Masa Sidang ke-1 Tahun

Sidang 2023-2024 ke Merauke, Provinsi Papua Selatan, Rabu (4/10) baru-baru ini.

"Kami dari Komisi IV DPR RI yang membidangi pertanian, kehutanan dan kelautan ingin melihat potensi pertanian dimana Merauke ini sebagai lumbung pertaniannya Papua. Selain pertanian, sektor perikanan dan kelautan juga yang ditinjau khususnya program yang dari kementerian untuk melihat efektivitas bantuan tersebut," ujarnya.

Tak hanya itu, Politisi Fraksi Partai Golkar ini pada kesempatan tersebut juga melakukan diskusi mengenai upaya pengembangan

pangan dan pertanian daerah dalam rangka menjaga ketahanan pangan dan kemandirian pangan.

Budhy menuturkan, dari hasil tinjauan untuk harga beras saat ini di tingkat pasar sudah mulai terkendali. Hal itu, pujiannya, berdampak positif bagi pertumbuhan perekonomian masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan pangan dalam mempertahankan ketahanan pangan.

Terkait hal itu, Budhy berharap stabilisasi harga pangan dapat terus terkendali. "Sehingga masyarakat dapat dengan mudah menjangkau berbagai bahan pangan untuk kebutuhan keluarga," pungkas Budhy.

eot/aha



# Muhammad Syafrudin Tekankan Pentingnya Edukasi dan Publikasi Satwa Dilindungi ke Masyarakat

**A**nggota Komisi IV DPR RI Muhammad Syafrudin meminta Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem (KSDAE) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk melakukan edukasi dan publikasi kepada masyarakat terkait UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, sehingga masyarakat paham tentang tumbuhan dan hewan apa saja yang perlu dijaga kelestariannya.

"Mungkin ada masyarakat yang memelihara hewan yang dilindungi sudah lama akan tetapi tidak tahu aturan ini dan nanti akhirnya terkena dengan hukum, untuk itu pentingnya peran KLHK untuk melakukan edukasi kepada masyarakat yang memiliki atau memelihara hewan yang dilindungi tersebut," kata Syafrudin saat diwawancarai **Parlementaria** di Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, Kamis (5/10).

Disela peninjauan ke Taman Wisata Alam (TWA) Kota Sorong, ia mengatakan bahwa pentingnya edukasi dan himbuan kepada masyarakat yang memelihara hewan yang dilindungi agar terekspos

kepada seluruh masyarakat Indonesia, sehingga masyarakat tahu apa saja jenis satwa yang dilarang untuk dipelihara.

"Kalau memang mau memelihara mungkin boleh tapi harus mendapatkan izin, tetapi kalau tidak mau dipelihara ya harus dilepas ke alam liar seperti yang kita lakukan tadi melakukan pelepasan secara simbolis beberapa hewan yang sudah sangat familiar kepada pemiliknya kita lepas kepada alam liar," tambahnya.

Supaya tidak disalahkan, ia melanjutkan, masyarakat yang mungkin sudah terlanjur memelihara hewan tersebut sehingga mau dilepas mungkin tidak enak, tidak dilepas pun akan menjadi pelanggaran hukum, oleh karenanya pemerintah diharapkan tetap melakukan edukasi dan publikasi kepada masyarakat apa saja jenis-jenis yang dilarang tersebut.

— cas/aha



FOTO: CAS/PDT

Anggota Komisi IV DPR RI Muhammad Syafrudin saat melakukan peninjauan ke Taman Wisata Alam (TWA) Kota Sorong dalam rangka Kunker Reses Komisi IV DPR RI di Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, Kamis (5/10/2023).

Scan QR untuk berita selengkapnya



# Komisi V Dorong Pemerintah dan Perusahaan Smelter Nikel Bersinergi Atasi Kemacetan di Morowali



Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Aras saat bertukar cenderamata usai memimpin Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI ke Morowali, Sulawesi Tengah, Rabu, (4/10/2023).

**W**akil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Aras mendorong adanya sinergi antara pemerintah dan perusahaan smelter nikel untuk segera mencari solusi dalam mengatasi kemacetan di Morowali, Sulawesi Tengah.

"Tentunya memang ini harus diatur dengan baik, harus ada sinergi antara pemerintah pusat dalam penyiapan infrastrukturnya untuk jalan nasional. Tentunya mungkin dari pemerintahan daerah ataupun dari pihak perusahaan dapat mengatur atau membuat pola agar supaya

**”**  
**TENTUNYA MEMANG INI HARUS DIATUR DENGAN BAIK, HARUS ADA SINERGI ANTARA PEMERINTAH PUSAT DALAM PENYIAPAN INFRASTRUKTURNYA UNTUK JALAN NASIONAL.**

kemacetan-kemacetan yang seperti ini dapat bisa segera ditangani," ungkap Andi kepada Parlementaria usai memimpin Kunjungan Kerja

Reses Komisi V DPR RI ke Morowali, Sulawesi Tengah, Rabu, (4/10).

Tak hanya itu, Andi Iwan pun mendorong agar Kementerian PUPR bisa segera melakukan pelebaran dan perbaikan jalan agar bisa meminimalisir kemacetan yang terjadi setiap harinya.

"Agar supaya kemacetan-kemacetan yang seperti ini dapat bisa segera ditangani. Kita mendorong Kementerian PUPR agar segera dapat memperlebar jalan nasional yang ada di Kabupaten Morowali ini akan bisa meminimalisir kemacetan yang selama ini terjadi di setiap harinya," ungkap

Selaras dengan yang disampaikan oleh Andi Iwan Aras, Anggota Komisi V DPR RI dapil Sulawesi Tengah Anwar Hafid menyampaikan bahwa memang pelebaran jalan menjadi solusi jangka pendek yang harus segera dilaksanakan.

"Jadi memang untuk jangka pendek, adalah memperlebat jalan nasional yang ada sekarang, kemudian memperbaiki sehingga bisa menampung lebih banyak kendaraan dibanding ada sekarang. Kemudian yang kedua tentu yang paling penting itu adalah penataan kawasan. Mungkin ada *shelter-shelter* base dimana harus kita siapkan dibuat semacam desain khusus kawasan ini. Sehingga sirkulasi kendaraan yang begitu padat dan sebagainya bisa terurai. Jadi saya kira itu untuk jangka panjangnya," pungkasnya. **syn/aha**

Scan QR untuk berita selengkapnya



# Eddy Santana Siap Kawal Usulan Program Pemkab Kupang

**A**nggota Komisi V DPR RI Eddy Santana Putra menilai sulit bagi Pemerintah Kabupaten Kupang untuk bekerja melengkapi segala kebutuhan infrastruktur di daerah tersebut. Sebab, sebagaimana informasi yang didapatkan, daerah ini hanya memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) di kisaran Rp100 miliar yang ditambah dengan transfer dari Pemerintah pusat sebesar Rp1,2 triliun.

"Ya perlu dibantu, PAD-nya hanya Rp100 miliar Kabupaten. Kemudian dana dari pusat transfer ke daerah, itu Rp1,2 triliun. Jadi (total) Rp1,3 triliun untuk daerah seluas ini, ya kurang. Saya kira mungkin di Rp2 triliun ideal, cukup ideal. Oleh karena itu perlu terobosan-terobosan bantuan dari program-program yang lain," kata Eddy saat ditemui **Parlementaria** usai

Kunjungan Kerja Reses Komisi V di Kupang, NTT, Rabu (4/10).

Politisi Fraksi Partai Gerindra ini mengungkapkan bahwa dalam kunjungan kerja inilah momen yang tepat bagi pemerintah daerah untuk mengusulkan apa saja infrastruktur yang dibutuhkan di daerahnya. "Nah tadi sudah disampaikan oleh Bupati, tentu banyak. Nah ini harus dibahas nanti di rapat-rapat Komisi V tapi dan peluangnya harusnya lebih besar dari yang tidak dilihat. Saya kira ini ya yang akan kita perjuangkan," sambung Eddy.

Wakil Bupati Kupang Jerry Manafe mengungkapkan kesulitan pembangunan infrastruktur ini didasari oleh ketentuan pemerintah pusat yang membatasi akselerasi dan kreativitas di daerah untuk mengelola seluruh anggaran sesuai RPJMD yang telah ditetapkan. Seluruh

anggaran yang telah ditentukan penggunaannya pada alokasi dana alokasi umum, dengan menggunakan dua pendekatan pemanfaatan yakni *block grant* dan *specific grant*.

Untuk itu, Jerry berharap dengan kehadiran Komisi V DPR RI dapat membantu pemda mempercepat akselerasi pembangunan infrastruktur di kab. Kupang. "Kami hanya menitipkan beberapa hal terkait pembangunan infrastruktur daerah yang kami nilai *urgen*. Untuk itu perkenankan kami setelah itu dapat menyampaikan beberapa proposal dan kami percaya proposal ini bisa diperjuangkan secara maksimal oleh bapak ibu komisi V DPR RI saat pembahasan APBN terutama pada tahun anggaran 2024," kata Jerry sembari memberikan proposal bantuan pembangunan infrastruktur di Kupang. **we/rdn**



Scan QR untuk berita selengkapnya



Anggota Komisi V DPR RI Eddy Santana Putra saat foto bersama di sela-sela Kunjungan Kerja Reses Komisi V di Kupang, NTT, Rabu (4/10/2023).

# Kunjungi Bali, Komisi VI Lakukan Pengawasan Ketahanan Energi

**D**alam rangka menjalankan fungsi pengawasan, pada masa reses kali ini, Komisi VI DPR RI melakukan kunjungan kerja reses (kunres) ke Kabupaten Badung, Provinsi Bali untuk meninjau Ketahanan energi di Provinsi Bali. Anggota Komisi VI DPR RI Gde Sumarjaya Linggih mengatakan bahwa tujuan kunres ini dinilai penting, sebab menurutnya ketahanan energi merupakan bagian dari upaya pemerataan

”

**HAL ITU PUN AKAN BERDAMPAK BAGI PENINGKATAN KINERJA PERUSAHAAN SEKALIGUS MENDUKUNG KETAHANAN ENERGI NASIONAL DAN KETAHANAN ENERGI DI PROVINSI BALI PADA KHUSUSNYA.**

Pembangunan di Provinsi Bali.

”Kami (Komisi VI DPR RI) ingin melihat langsung tugas Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai *Agent of Development* dalam mewujudkan Ketahanan Energi. Terutama ketersediaan jaringan listrik untuk rakyat dan ketersediaan BBM baik untuk industri, rumah tangga, petani, nelayan dan seluruh aspek kehidupan di Provinsi Bali,” jelas politisi dapil Bali itu, Rabu (4/10).

Sebagai informasi, salah satu badan yang dinilai paling berperan menjalankan tugas tersebut adalah PT Pertamina (Persero) dan *subholding*-nya antara lain PT Pertamina Patra Niaga, PT Pertamina Gas Negara serta PT Pertamina International Shipping serta PT Pertamina Hulu Energi.

Karena itu, dalam hal ini legislator yang akrab disapa Demer ini berharap Pertamina Holding dan ke-empat *subholding*-nya tersebut dapat meningkatkan kualitas pengelolaan sektor energi secara terintegrasi dari hulu ke hilir. “hal itu pun akan berdampak bagi peningkatan kinerja Perusahaan sekaligus mendukung ketahanan energi nasional dan ketahanan energi di Provinsi Bali pada khususnya,” tegasnya.

Melihat hal tersebut, Demer pun ingin memastikan bahwa Bali selalu mendapatkan energi terbaik dan tidak akan mengalami kekurangan pasokan energi khususnya pada saat acara-acara internasional, acara besar, seperti Natal dan Tahun Baru. **hnm/aha**



Anggota Komisi VI DPR RI Gde Sumarjaya Linggih saat bertukar cenderamata usai melakukan pertemuan kunres ke Kabupaten Badung, Provinsi Bali.

FOTO:HNM/PDT

Scan QR untuk berita selengkapnya



# Komisi VII Apresiasi Inovasi Pertamina Hulu Energi Kelola Sumur Tua Migas Di Tarakan

**A**nggota Komisi VII DPR RI Willy Midel Yoseph apresiasi inovasi PT Pertamina Hulu Energi (PHE) sebagai sub-*holding* dari PT Pertamina (Persero) dalam hal pengelolaan sumur tua migas di Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Meskipun sumur tua ini sudah tersedia sejak zaman Belanda, perusahaan senantiasa mendorong munculnya inovasi dan aplikasi teknologi.

"Inovasi dan aplikasi teknologi ini didorong guna meningkatkan keselamatan, kehandalan, dan keunggulan operasi migas. Salah satu yang telah dikembangkan disini adalah *Green EnvironMental oil Pump Installation (GEMPI)* dari Pertamina EP (PEP) Tarakan *Field*. Dengan menggunakan metode *Mini Chain Pumping Unit*, cocok untuk pengaplikasian sumur minyak yang minimalis, baik dari segi biaya maupun lokasi. Melihat

usia sumur ini sudah tua," tuturnya saat ditemui dalam Kunker Reses Komisi VII ke Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, Rabu (4/10).

Lanjutnya, ia menambahkan bahwa inovasi ini nantinya bisa dicanangkan dengan target *Net Zero Emissions* pada tahun 2060. Melihat transisi energi berperan penting, khususnya pada subsektor migas. "Intinya berbagai kebijakan dan langkah-langkah strategis harus benar-benar dirumuskan secara cermat, sehingga di

satu sisi ketersediaan dan akses terhadap energi migas tetap terjamin kedepannya," ujar Politisi PDI-Perjuangan ini.

Willy berharap agar inovasi ini dapat memperkuat kerangka kebijakan pengelolaan migas di Indonesia, yaitu dengan menjangkir investasi baru. "Guna meningkatkan daya saing sektor migas, investor ini terus kita dorong kepada Pemerintah, termasuk memperbaiki aturan fiskal guna meningkatkan daya tarik investasi," tutupnya.

dip/aha

”

**INOVASI DAN APLIKASI TEKNOLOGI INI DIDORONG GUNA MENINGKATKAN KESELAMATAN, KEHANDALAN, DAN KEUNGGULAN OPERASI MIGAS.**

Scan QR untuk berita selengkapnya



FOTO: DIP/PDT

Anggota Komisi VII DPR RI Willy Midel Yoseph saat mengikuti Kunker Reses Komisi VII ke Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, Rabu (4/10/2023).

# Legislator Ingatkan Jangan Palsu Hilirisasi Nikel di Indonesia

**A**nggota Komisi VII DPR RI Bambang Patijaya menghimbau agar hilirisasi nikel di Indonesia tidak menjadi hilirisasi palsu. Ia memaksudkan bahwa proses penambangan nikel di Indonesia hanya agar nikel dapat di ekspor ke luar saja. Ia juga merasa investasi yang masuk ke Indonesia

”

**TIDAK PERNAH DIBUAT SUATU LAPORAN SURVEYOR. LALU KETIKA MEMBAYAR ROYALTI DENGAN DASAR NIKEL YANG KADARNYA RENDAH HANYA 5%, SEMENTARA SISANYA MENGANDUNG APA ITU TIDAK PERNAH DIBAHAS.**

hanya investasi berteknologi rendah.

Produk olahan yang dihasilkan hanya *Nickel Pig Iron* (NPI) yang merupakan feronikel berkadar rendah. Padahal

masih banyak kandungan mineral tambang yang ada di Sulawesi Tenggara yang dapat dimanfaatkan.

”Tidak pernah dibuat suatu laporan surveyor. Lalu ketika membayar royalti dengan dasar nikel yang kadarnya rendah hanya 5%, sementara sisanya mengandung apa itu tidak pernah dibahas. Karena didalam kandungan mineral yang ada di Sulawesi ini, selain nikel, terkandung macam-macam seperti silika, mangan, zat besi, magnesium serta kobalt. Itu semua ada harganya,” ungkap Bambang saat mengikuti Kunjungan Kerja (Kunker) Reses Komisi VII DPR RI ke PT. Virtue Dragon Nickel Industry di Kab. Konawe, Sulawesi Tenggara, Rabu (4/10).

Politisi Partai Golkar tersebut juga mengkritisi pemberi izin, yaitu Kementerian Investasi/BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) jangan hanya merasa gempita menerima investasi. Ia merasa kementerian tersebut tidak memiliki visi untuk merealisasikan visi nasional sebagai negara industri.

”Kita tidak bisa menyalahkan investor, karena mereka memang tujuannya itu. Tetapi apabila mereka dituntut dalam proposal bisnis investasinya untuk lebih mengolah sumber daya alam yang ada menjadi memiliki nilai tambah lebih itu lebih baik,” tuturnya. **uf/aha**



FOTO:UBD/PRD

Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Patijaya saat mengikuti pertemuan Kunjungan Kerja (Kunker) Reses Komisi VII DPR RI ke PT. Virtue Dragon Nickel Industry di Kab. Konawe, Sulawesi Tenggara, Rabu (4/10/2023).

Scan QR untuk berita selengkapnya



# Komisi VIII Pastikan **MAN 1 Padang Pariaman** Dapat Dana SBSN

**K**omisi VIII DPR RI menyambangi Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Padang Pariaman untuk melihat perkembangan madrasah di kabupaten tersebut. Adapun madrasah yang didatangi cukup berprestasi, namun Komisi VIII mencatat MAN ini belum pernah mendapatkan dana Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), dimana hal ini menjadi perhatian Komisi VIII.

"Saya sebagai putra daerah Padang Pariaman untuk mengusulkan membangun madrasah ini dengan dana SBSN, dan juga membawa kawan-kawan di Komisi VIII DPR dalam rangka kunjungan reses untuk melihat betul bagaimana kondisi MAN 1 Padang Pariaman," hal tersebut dikatakan Anggota Komisi VIII DPR RI John Kenedy Azis, usai pertemuan di MAN 1 Padang Pariaman, Rabu (4/10).

Dalam kesempatan yang sama Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang mengatakan

DPR itu berada dimana untuk merumuskan kebijakan tentunya bersama pemerintah nah di sini kita ingin melihat bagaimana perhatian pemerintah terhadap madrasah, tentunya harus sebanding dengan sekolah negeri yang lain baik itu infrastruktur, sarana dan prasarana ataupun SDMnya.

"Kami ingin memastikan apakah madrasah sudah menjadi alternatif pilihan masyarakat ternyata di Padang Pariaman ini cukup banyak masyarakat yang memilih madrasah untuk bersekolah disini. Maka kami ingin kebijakan ini regulasinya harus dirubah, juga ingin memastikan peran pemerintah itu seperti apa, disini kami menemukan di MAN 1 Padang Pariaman ini belum tersentuh dana APBN sedangkan ada sumber anggaran Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) mestinya madrasah ini mendapatkan dana tersebut," ujar Marwan.

Lebih lanjut Marwan mengatakan Madrasah ini lokasinya

cukup strategis namun ada permasalahan di belakang MAN ini ada sungai dan sungai ini sering mengakibatkan banjir, disini kami ingin anak-anak ini nyaman dalam belajar. "Untuk itu penyelesaiannya harus melibatkan banyak pihak agar masalah banjir tersebut bisa dicarikan jalan keluarnya, ke depan masalah itu harus ditangani dengan baik supaya madrasah ini tidak terdampak banjir," harapnya.

Di kesempatan yang sama Kakanwil Kemenag Sumbar H.Helmi dalam sambutannya mengucapkan terimakasih dan bangga atas kunjungan kerja Komisi VIII DPR RI ke Sumatera Barat. "kami sangat senang dan mendapat berkah atas kehadiran Bapak Ibu dari Komisi VIII DPR RI, dan terkhusus bagi sohibul bait hari ini MAN 1 Padang Pariaman, yang telah menyambut rombongan dengan luar biasa, semoga mendapat berkah," harap H.Helmi.

man/aha



Anggota Komisi VIII DPR RI John Kenedy Azis, saat mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi VIII DPR RI mengunjungi MAN 1 Padang Pariaman, Rabu (4/10/2023).

Scan QR  
untuk berita  
selengkapnya



FOTO: MAN/PDI

# Pemerintah Harus Hadir Bantu Permasalahan Anak Terlantar

**A**nggota Komisi VIII DPR RI, Endang Maria Astuti meminta pemerintah hadir untuk membantu berbagai permasalahan yang kerap menimpa anak terlantar. Hal itu ia ungkapkan usai Kunjungan Kerja (Kunker) Reses Komisi VIII DPR RI ke Provinsi Bali.

Dari kunker tersebut, ia mendapati berbagai permasalahan anak terlantar. Salah satunya adalah tentang kesulitan dalam pencatatan sipil. Ia sangat menyayangkan hal tersebut, sebab negara harus melindungi mereka.

"Banyak kan anak terlantar yang tidak punya identitas. Ini juga harusnya dipermudah pemerintah, baik pemerintah pusat maupun

”

**BANYAK KAN ANAK TERLANTAR YANG TIDAK PUNYA IDENTITAS. INI JUGA HARUSNYA DIPERMUDAH PEMERINTAH, BAIK PEMERINTAH PUSAT MAUPUN DAERAH.**

daerah. Agar mereka merasa bahwa 'saya ini adalah anggota dari suatu negara' gitu ya," ucapnya Kamis (5/10).

Endang kemudian mendorong pemerintah untuk lebih memberi perhatian kepada para lembaga yang

memberikan suaka bagi para anak terlantar. Sebab menurut Endang apa yang dilakukan mereka adalah tugas yang mulia.

"Perlu dorongan dari pemerintah, karena pemerintah sendiri terkadang tidak punya instrumen memberdayakan mereka. Nah, yang seperti ini yang seharusnya mendapatkan apresiasi," lanjutnya.

Legislator Partai Golkar itu pun mendorong perbaikan regulasi agar anak-anak terlantar lebih diperhatikan negara. Ia juga berpesan kepada pemerintah turut memperhatikan kondisi fisik dan psikis dari seorang Ibu. Sebab menurutnya, salah satu penyebab penelantaran anak adalah Ibu yang tidak siap akan kehadiran anak. **ndn/aha**



FOTO: NDN/PDI

Anggota Komisi VIII DPR RI, Endang Maria Astuti saat melihat kondisi anak terlantar di sela-sela Kunjungan Kerja (Kunker) Reses Komisi VIII DPR RI ke Provinsi Bali.



# Layanan Kesehatan di Provinsi Kaltara Masih Kekurangan SDM dan Alkes

**T**im Kunjungan Kerja Komisi IX DPR menemukan sejumlah kekurangan sumber daya manusia dan alat Kesehatan pada saat meninjau Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Jusuf SK dan Rumah Sakit Daerah (RSD) Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara).

Menurut Wakil Ketua Komisi IX DPR Kurniasih Mufidayati tentu hasil temuan ini harus mendapatkan perhatian khusus. Apalagi, tambahnya, Provinsi Kaltara ini memiliki prospek untuk bisa menjadi provinsi yang unggul ke depan, sehingga harus didukung kemajuannya.

"Provinsi Kaltara ini kan berbatasan dengan negara lain. Kita mau upayakan agar layanan kesehatannya dilengkapi, sehingga tidak harus membuat masyarakat di sini berobat jauh-jauh, apalagi kalau sampai berpikir ke luar negara Indonesia. Rasanya memang harus segera dilengkapi ya, baik itu SDM maupun Alkesnya," ujar perempuan yang juga menjadi Ketua Tim Kunker Reses tersebut kepada **Parlementaria** usai peninjauan di Provinsi Kaltara, Kamis (5/10).

Menurut Politisi Fraksi PKS ini, m RSUD dr. Jusuf SK secara fasilitas sudah lumayan lengkap. Hanya saja, tambahnya, masih kekurangan SDM terutama tenaga kesehatannya. Dalam pantauan Komisi IX, alat untuk pasang ring jantung sudah ada di RSUD ini, namun, sayangnya sudah setahun belum digunakan karena SDM-nya sudah ada tetapi masih harus menempuh pendidikan lebih



FOTO: IKA/PDI

Wakil Ketua Komisi IX DPR Kurniasih Mufidayati bersama tim saat meninjau Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Jusuf SK dan Rumah Sakit Daerah (RSD) Kota Tarakan, di Provinsi Kaltara, Kamis (5/10/2023).

lanjut dulu di Jakarta untuk belajar.

"Kita di Komisi IX selalu memprioritaskan anggaran itu untuk Alkses di Rumah Sakit Umum Daerah, baik tingkat provinsi maupun kota. Tapi yang menjadi catatan kami hari ini, supaya tidak mengalami kejadian yang sama, Alkes yang disediakan harus diimbangi juga dengan ketersediaan SDM," imbuh Kurniasih.

Dalam kesempatan lain, Legislator Dapil DKI Jakarta II ini juga meninjau Rumah Sakit Daerah (RSD) Kota Tarakan, rumah sakit disini masih kekurangan alat CT scan. "Nanti akan kita dorong untuk alkesnya lebih lengkap lagi, walaupun RS ini termasuk tipe C, menurut saya untuk ukuran daerah sudah sangat bagus, sudah ada kemandirian dalam pengelolaannya. Tinggal nanti kita akan support untuk alkesnya," ungkap Kurniasih.

Pada Kesempatan yang sama, Anggota Komisi IX DPR RI Nur Yasin mengatakan, ada kesalahan prosedur terkait pengadaan alat di RSUD dr. Jusuf SK Provinsi Kaltara. Seharusnya, semua peralatan yang dipilih itu harus sejalan dengan Pendidikan SDM yang ada di RS tersebut.

"Jadi, begitu dia telah selesai menyekolahkan orang, baru beli alat itu. Nah, kejadiannya di sini alkesnya sudah ada, bahkan sempat tidak berfungsi selama satu tahun karena tidak ada yang bisa mengoperasikan. Ini suatu kesalahan yang menurut saya harus dibenahi. Kemenkes harus memastikan semua belanja alkes yang itu harus didahului oleh belanja peningkatan SDM. Sebelum itu jangan diberikan, ini jadi salah satu standar yang perlu perbaiki," ucap Yasin. **jk/rdn**

Scan QR untuk berita selengkapnya



# Suir Syam: BPVP Padang Butuh Suntikan Dana Pemerintah Pusat

**A**nggota Komisi IX DPR RI Suir Syam mendorong pemerintah pusat agar dapat menggelontorkan dana bantuan bagi pembangunan fasilitas Balai Pelatihan Vokasi Produktivitas (BPVP) Padang yang masih terbengkalai akibat kekurangan anggaran. Dikatakannya, bantuan dana dari pemerintah tersebut sangatlah diharapkan agar BPVP Padang kedepannya bisa menghasilkan tenaga-tenaga terampil yang siap untuk bekerja baik didalam maupun diluar negeri.

"Balai Pelatihan Vokasi Produktivitas di Padang tergolong bagus. Cukup banyak program pelatihan yang dilakukan. Dalam setahun ada seribu orang yang dilatih disana. Hanya saja kita lihat pembangunannya ada yang masih terbengkalai karena kekurangan dana. Jadi kami mengharapkan

pemerintah pusat dapat menggelontorkan dana supaya bisa BPVP Padang ini bisa menghasilkan tenaga terampil yang siap bekerja," kata Suir Syam kepada **Parlementaria** usai Kunjungan Kerja Reses Komisi IX, di Padang, Sumatera Barat, Rabu (4/10).

Menurutnya, kalau fasilitas ruangan-ruangan pelatihan yang ada di BPVP Padang ini sudah siap dan mendukung, maka pelatihan yang dilakukan juga pasti akan lebih baik. "Tentu masyarakat Sumatera Barat, baik yang ingin bekerja di dalam maupun di luar negeri sudah bisa mempunyai keterampilan yang cakap," ujar Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.

Seperti dikabarkan, Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Padang saat ini telah menghadirkan pelatihan operator alat berat (ekskavator). Pelatihan ini merupakan

kelas baru dan pertama kali dibuka di BPVP Padang yang dibiayai sepenuhnya oleh Kemnaker RI.

Sebelumnya, pada saat kunjungan kerja Komisi IX DPR RI ke Rumah Sakit Dr M. Djamil Padang, Suir Syam sempat menyampaikan bahwa perkembangan layanan kesehatan di RSUP Dr M Djamil sangat luar biasa. Namun demikian rumah sakit rujukan ini masih belum bisa melayani permintaan layanan kesehatan secara utuh dari masyarakat yang membutuhkan karena terkendala keterbatasan ruang rawat yang ada.

"Begitu juga dengan Instalasi Pelayanan Jantung Terpadu dimana RSUP M Djamil sudah bisa melakukan operasi bedah jantung tetapi baru bisa dilakukan hanya dua kali dalam seminggu. Kalau dilakukan tiap hari menyebabkan tidak cukup ketersediaan ruang perawatan akibat operasi itu. Sehingga daftar tunggu operasi jantung bisa sampai dengan 30 hari bahkan 2 bulan. Akibatnya banyak pasien jantung yang akhirnya memutuskan untuk pergi berobat ke luar negeri karena keterbatasan tempat perawatan," terangnya.

Ia menegaskan, pemerintah perlu menuntaskan permasalahan ini. Menurutnya harus dilakukan pembangunan- pembangunan selanjutnya untuk menampung masyarakat. "Sebagai rumah sakit rujukan nasional, Rumah Sakit M Djamil Padang memang bebannya berat. Saat ini diperlukan dana sekitar 180 miliar untuk mendukung peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan di RS M Djamil ini," pungkasnya.

dep/rdn



FOTO: DEP/PDI

Anggota Komisi IX DPR RI Suir Syam saat mengikuti pertemuan Kunjungan Kerja Reses Komisi IX, di Padang, Sumatera Barat, Rabu (4/10/2023).



# Formasi Pustakawan Harus Diperbanyak untuk Tingkatkan Literasi

**A**nggota Komisi X DPR RI Illiza Sa'aduddin Djamal menyampaikan bahwa pentingnya membuka formasi pustakawan baik untuk PPPK maupun CPNS. Hal tersebut disampaikan sebagai tanggapan atas kekhawatiran akan kekurangan pustakawan dalam menghadapi situasi darurat literasi di Indonesia.

Illiza, menyampaikan bahwa keluhan dan aspirasi dari beberapa daerah yang dikunjungi terkait kondisi keberadaan pustakawan saat ini. "Kita banyak menerima aspirasi tentang keberadaan pustakawan, kita darurat literasi tapi kemudian formasi terhadap pustakawan

itu masih sangat sedikit," ujar Illiza saat kunjungan kerja Komisi X ke Semarang, Rabu (4/10).

Politisi PPP ini juga menekankan pentingnya peran pustakawan dalam meningkatkan literasi di Indonesia. "Pustakawan itu menjadi kewajiban keharusan kalau kita benar-benar ingin meningkatkan literasi dan numerasi," ujarnya.

Lebih lanjut, Illiza menyampaikan bahwa pustakawan memiliki peran kunci dalam mengelola perpustakaan, baik yang ada di sekolah maupun yang resmi oleh pemerintah.

Dalam konteks undang-undang ASN yang baru, Illiza mendesak agar formasi pustakawan nantinya akan membuka formasi pustakawan lebih

banyak. Menurutnya, pustakawan yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai akan mendorong percepatan peningkatan literasi di Indonesia. Mereka tidak hanya mengatur buku tetapi juga tahu bagaimana mengelola perpustakaan dan bagaimana mengajak orang untuk aktif membaca.

Illiza juga berharap bahwa dengan undang-undang ASN yang baru, Indonesia dapat memberikan perhatian yang lebih besar terhadap literasi dan memastikan bahwa formasi pustakawan tetap diperhatikan, sehingga dapat mengatasi tantangan literasi yang masih jauh dari harapan.

— skr/aha



Scan QR  
untuk berita  
selengkapnya



Anggota Komisi X DPR RI Illiza Sa'aduddin Djamal dalam foto bersama usai mengikuti pertemuan Kunker Reses Komisi X DPR RI.

FOTO: SKR/PDT

# Belajar dari Solo, Komisi X Tekankan Pembangunan Pariwisata Harus dari Hulu ke Hilir

**W**akil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menekankan

bahwa Kota Solo dapat dijadikan pembelajaran bahwa pembangunan pariwisata harus dirancang mulai dari hulu ke hilir. Hal itu disampaikan Fikri Faqih saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi X ke Kota Solo, Jawa Tengah. Kunjungan reses ini dalam rangka menggali aspirasi dari Pemerintah serta masyarakat Surakarta, sekaligus melakukan pengawasan terhadap implementasi berbagai kebijakan Pemerintah Daerah.

Salah satu pembangunan pariwisata di Kota Solo yang dapat dijadikan 'benchmark' tersebut adalah pariwisata berbasis UMKM Batik. "Solo, Pekalongan, itu kan terkenal dengan batiknya. Di Solo itu orang kalau datang ke sini, seperti halnya di negara lain, Maroko misalnya, itu kan orang datang untuk berbelanja, dibawa ke tempat melihat proses menguliti hingga menjadi produk berbahan kulit yang sudah jadi," ujar Fikri Faqih kepada **Parlementaria**, di Solo, Jawa Tengah, Rabu (4/10).

Sehingga, lanjutnya, orang yang berbelanja di lokasi wisata tersebut juga mendapatkan edukasi yang diatur oleh regulasi dan difasilitasi oleh Pemerintah. Sehingga, di sektor hilir ini, akan berkaitan dengan *travel agency* yang mengarahkan, misalnya,

ke lokasi tempat pengolahan kulit tersebut. "Namun, harus juga diatur agar produksi tidak terganggu karena ada kunjungan wisatawan dan sebagainya," jelas Politisi Fraksi PKS ini.

Di sisi lain, ia menjelaskan, di Tahun Sidang 2023-2024 ini, Komisi X tengah menyusun Revisi UU Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata. Revisi dilakukan karena perkembangan pariwisata menuntut beberapa penyesuaian, utamanya karena terjadinya perubahan paradigma dari *mass tourism* ke *quality tourism*, dan *sustainable tourism*. Selain itu, pandemi Covid-19 juga telah memberikan banyak pelajaran agar sektor pariwisata bertahan di tengah krisis.

"Terkait revisi UU Pariwisata ini, kami tengah melakukan kajian dan mendapatkan

poin-poin perubahannya. Kami mengharapkan, para pemangku kepentingan pariwisata yang hadir hari ini, memberikan masukan dan pandangan, mengingat Surakarta juga dikenal sebagai daerah pariwisata," tutupnya.

— rdn

FOTO: RDN/PDT



Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi X ke Kota Solo, Jawa Tengah.

Scan QR untuk berita selengkapnya



# Pertanyakan Arah Pembangunan Daerah, Didi Irawadi Soroti Kesenjangan Antara Bali Utara dan Selatan

**B**erdasarkan laporan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS, disebutkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah sedang berusaha mengimplementasikan kebijakan yang bertujuan memperkecil kesenjangan ekonomi dan sosial di Provinsi Bali. Dengan visi 'Nangun

Sat Kerthi Loka Bali', kebijakan ini direncanakan akan membangun sejumlah proyek infrastruktur.

Menyoroti upaya tersebut, Anggota Komisi XI DPR RI Didi Irawadi Syamsuddin mengingatkan agar kajian arah pembangunan Provinsi Bali 2020-2024 berbasis pada kekuatan pemetaan kekuatan lokal. Menurutnya, nilai ini krusial agar kesenjangan ekonomi antara wilayah bagian utara dan selatan tidak semakin timpang. Dirinya pun juga tidak ingin konflik sosial terjadi.

"Kita bicara tingkat kemiskinan dan kesenjangan yang terjadi terlihat jelas dan masih terjadi cukup signifikan, menurut saya. Bali itu sendiri, kalau di-compare dengan Indonesia secara keseluruhan, memang Bali pemulihan ekonomi lebih baik, tapi kesenjangannya cukup besar," tanggap saat ditemui

Didi

oleh **Parlementaria** usai mengikuti Kunjungan Kerja Komisi XI DPR di Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Rabu (4/10).

Padahal, sebelumnya, papar Politisi Fraksi Partai Demokrat itu, masyarakat kawasan utara mampu hidup sejahtera karena perputaran ekonomi sektor pertanian dan kelautan mampu bersaing di pasar lokal dan mancanegara. Namun kini, ia menyayangkan sumber daya utara semakin surut lantaran pemerintah lebih fokus melindungi sektor pariwisata dan tidak menjaga keberlanjutan dari potensi kelautan dan pertanian yang telah dimiliki.

Sebab itu, dirinya mengingatkan segenap pemerintah melakukan sinkronisasi rencana arah pembangunan di Bali secara komprehensif. Ia pun mengingatkan kekuatan lokal harus jadi pertimbangan vital dalam penyusunan kebijakan maupun implementasinya.

Di sisi lain, Didi mendukung upaya pemerintah membangun infrastruktur yang mendukung konektivitas antar kota/kabupaten di Provinsi Bali. Jika digarap serius, ia yakin seiring berjalannya waktu, mobilisasi arus giat ekonomi semakin lancar. Sehingga, masyarakat dapat merasakan dampak positif signifikan dari pembangunan tersebut.

"Dengan paparan yang disampaikan oleh mitra kerja, saya harap optimisme tetap hidup untuk Provinsi Bali," pungkasnya.

ts/rdn

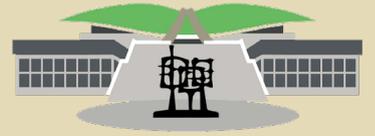


FOTO: TS/PDT

Anggota Komisi XI DPR RI Didi Irawadi Syamsuddin saat mengikuti Kunjungan Kerja Komisi XI DPR di Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Rabu (4/10/2023).

Scan QR untuk berita selengkapnya





**SEMINAR TENTANG STROKE P3S DI GEDUNG SERBAGUNA, MASJID BAITURRAHMAN, KOMPLEKS DPR RI, SENAYAN JAKARTA, RABU (18/10).** FOTO: FHN/PDT



**PLT KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA SETJEN DPR RI, DJAKA DWI WINARKO FOTO BERSAMA USAI KULIAH UMUM KAMPUS MERDEKA, DI GEDUNG NUSANTARA, DPR RI, SENAYAN, JAKARTA, SELASA (17/10/2023).** FOTO: FHN/PDT



**KEPALA BIRO PEMBERITAAN PARLEMEN SETJEN DPR RI, INDRA PAHLEVI SAAT MENERIMA KUNJUNGAN DARI BIRO KOMUNIKASI IPB MELIHAT LANGSUNG STUDIO TVR PARLEMEN DI SENAYAN, JAKARTA, SELASA (17/10/2023).** FOTO: RSB/PDT

